

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat merupakan Negara Adidaya yang memiliki kekuatan politik, militer, ekonomi di dunia. Pasca Uni Soviet mengalami keruntuhan dimasa perang dingin, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia dengan sistem demokrasinya. Keadidayaannya Amerika Serikat didukung oleh kontrol pemerintah Amerika Serikat terhadap kebijakan dalam negeri maupun luar negeri yang diatur ketat oleh sistem Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri yang kuat memberikan dampak terhadap Negara Amerika Serikat yang membuat Amerika Serikat mampu dihormati di mata dunia Internasional. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat didukung dengan national power yang dimiliki Amerika Serikat.

Amerika Serikat memiliki landasan ideologi berupa demokrasi yang mengutamakan tentang adanya jaminan hak-hak pada kebebasan individu. Seiring berjalannya waktu Amerika Serikat dikenal sebagai *mother of democracy* di dunia. Dengan adanya julukan tersebut maka Amerika Serikat merasa memiliki tanggung jawab terhadap penyebaran demokrasi di dunia. Salah satu upaya Amerika Serikat dalam menyebarkan nilai demokrasi di dunia yaitu dengan mendukung negara-negara di dunia yang ingin mendapatkan kedaulatan negaranya melalui kemerdekaan.

Lahirnya Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Right*) tahun 1948 membuat Amerika Serikat memahami bahwa keberadaan hak asasi manusia membantu mengamankan perdamaian, mencegah agresi, mempromosikan aturan

hukum, memerangi kejahatan dan korupsi, memperkuat demokrasi, dan mencegah krisis kemanusiaan. Deklarasi ini mencantumkan penjaminan atas kebebasan manusia terutama kebebasan beragama, berpendapat, kepemilikan, dan perilaku. Itulah mengapa Amerika Serikat sangat menginginkan adanya perdamaian di seluruh dunia.

Selain demokrasi Amerika Serikat saat ini mulai menyebarkan fokusnya dalam hal perlawanan terhadap terorisme. Terorisme menjadi penting sejak terjadinya peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat (Cipto 2007). Peristiwa tersebut menyerang beberapa fasilitas penting yang dianggap sebagai lambang superioritas Amerika Serikat sebagai Negara adidaya yang hebat baik dalam bidang ekonomi, intelijen, pertahanan dan kekuatan militer. Tragedi 11 September 2001 telah membuka kemungkinan berubahnya parameter yang digunakan Amerika Serikat dalam menilai sebuah negara.

Sekarang ini, Amerika Serikat lebih mengkhawatirkan masalah isu terorisme daripada isu demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) (M. P. Prof.Drs.Budi Winarno 2014). Dengan adanya kecenderungan yang mengaitkan Islam dengan terorisme dikalangan para pengambil kebijakan di Amerika Serikat, tatanan politik global semakin diperumit oleh ketegangan antara Amerika Serikat dengan dunia Islam. Sehingga hal tersebut membuat Amerika Serikat melakukan reaksi keras kepada dunia internasional mengenai adanya terorisme internasional. Dari strategi yang diterapkan Amerika Serikat, terlihat bahwa Amerika Serikat berusaha untuk menunjukkan hegemoninya kepada dunia dan adanya keinginan untuk memerangi teroris yang sampai dengan saat ini identik dengan dunia Islam.

Negara-negara Islam memiliki peranan penting sebagai obyek dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Secara umum Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki sejumlah

kepentingan di kawasan Timur Tengah baik dalam bidang, politik, militer maupun ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena kawasan Timur Tengah memiliki nilai strategis dalam politik dunia. Nilai-nilai strategis tersebut membuat kawasan Timur Tengah menjadi tempat perebutan pengaruh dan kepentingan bagi negara-negara adidaya dunia, terkhusus bagi Amerika Serikat. Oleh sebab itu, sejak lama elit pembuat kebijakan Amerika Serikat telah waspada terhadap potensi radikal dari berbagai macam revolusi yang terjadi di kawasan Timur Tengah.

Pasca tragedi WTC 11 September 2001 Amerika Serikat di bawah pemerintahan George W. Bush menyatakan *war on terrorism* (perang terhadap terorisme) dengan menyerang Afganistan. Sejak saat itu Negara barat menganggap Negara Islam sebagai musuh. Banyak contoh kasus bahwa Amerika Serikat terlibat dalam konflik Negara Islam. Untuk menghadapi dan membendung gerakan oleh kelompok-kelompok Islam yang disebutnya sebagai fundamentalis, ekstrimis, atau terorisme Islam, hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa Amerika Serikat ikut campur dalam masalah-masalah di timur tengah seperti masalah antara Irak dan Iran, serta masalah negara mesir dan dukungannya terhadap Israel.

Keberadaan Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) telah menyita perhatian global dewasa ini. ISIS lahir di perbatasan antara Irak dan Suriah dan telah menguasai sekitar 400 km persegi di wilayah tersebut. Cita-cita melahirkan pemerintahan dan Negara Islam dilakukan dengan melakukan maklumat yang mewajibkan umat Islam di dunia mendukung gerakan mereka memerangi kekuasaan asing di Timur Tengah. (Sinaga 2014)

Saat ini ISIS berkembang menjadi organisasi yang sangat kuat, keinginan mereka untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri dengan membentuk negara Islam sebagai identitas diri sehingga hak dan kewajiban yang mereka miliki dapat dipenuhi dengan

adanya negara tersebut. Pada tanggal 29 Juni 2014, ISIS mendeklarasikan kekhilafahan Abu Bakar Al-Baghdadi yang selanjutnya dikenal sebagai Khalifah Ibrahim, dan mengubah nama menjadi Daulah Khilafah atau IS (*Islamic State*). Pendeklarasian terjadi setelah ISIS berhasil menduduki kota Mosul pada tanggal 30 Juni 2014. ISIS adalah organisasi teroris, namun ia bukan hanya organisasi teroris. Ia adalah juga semacam mafia yang mahir dalam bermain di pasar gelap minyak dan perdagangan senjata transnasional. ISIS juga kelompok militer konvensional yang dimobilisasi dan menerjunkan pasukan darat yang memiliki keahlian profesional yang membuat terkesan para anggota militer Amerika Serikat. (Hassan 2015) Secara *de jure* hingga saat ini belum ada Negara di dunia yang mengakuinya sebagai Negara.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama menegaskan semua negara besar dan kecil harus memenuhi tanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan norma-norma internasional. "*Seratus tahun yang lalu, Perang Dunia merenggut nyawa jutaan orang. Ini membuktikan bahwa dengan kekuatan yang mengerikan dan persenjataan modern, mengantarkan banyak orang ke kuburan. Saat ini, akan muncul kembali kekuatan fasisme dan supremasi ras.*" Sehingga kita harus waspada kepada cara-cara tiap-tiap negara dalam mendeklarasikan kemerdekaannya yang harus sesuai dengan norma-norma internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu "*Bagaimana kebijakan Amerika Serikat terhadap terorisme ISIS?*"

C. Kerangka Pemikiran

Konsep Counter - Terrorism

Dalam mengkaji upaya-upaya menghadapi terorisme dapat kita gunakan sebuah konsep yang biasa disebut dengan *Counter-Terrorism* atau dalam Bahasa Indonesia biasa disebut sebagai Strategi Kontra-Terorisme. *Counter terrorism* diartikan sebagai tindakan untuk melawan ancaman terorisme, mencegah terorisme, dan mengurangi pengaruh organisasi terorisme. Kita dapat menggunakan dari strategi kontra-terorisme yang dilakukan oleh Uni Eropa (European Union Counter-Terrorism Strategy) pada tahun 2005. (M. P. Prof.Drs.Budi Winarno 2014)

Komitmen utama strategi *counter-terrorism* ini adalah “menanggulangi terorisme dengan tetap menjamin dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), dan menjadikan sebuah Negara ataupun kawasan tempat yang aman, bebas, dan adil (UNITED NATIONS ACTION TO COUNTER TERRORISM n.d.). Tujuan ini dicapai melalui beberapa strategi melawan terorisme, yaitu :

Pertama yakni ***prevention***. *Prevention* adalah sebuah upaya untuk mencegah orang-orang masuk kedalam jaringan teror, baik dalam lingkup suatu Negara, kawasan, maupun internasional. Menanggulangi faktor atau akar penyebab yang dapat menyebabkan radikalisasi dan rekrutmen oleh para anggota terorisme. Salah satu upaya *prevention* dapat dilakukan dengan memperketat keamanan. Terorisme tidak bisa dibenarkan karena dapat mengancam keamanan dan perdamaian di dunia. Kita harus mengidentifikasi dan melawannya agar masyarakat tidak masuk dalam jaringan terorisme. Jaringan terorisme dapat dilawan dengan keterlibatan masyarakat. Untuk mencegah perekrutan terorisme kita dapat mencegahnya dengan mengacaukan dan mengganggu aktivitas mereka seperti pada perekrutan teroris melalui akses jaringan internet maupun secara langsung.

Tidak sedikit organisasi teroris itu menyebarkan pandangan ekstremis yang membawa individu mempertimbangkan dan membenarkan kekerasan. Di samping itu juga ada berbagai kondisi di masyarakat yang dapat menciptakan sebuah lingkungan dimana individu-individu dapat dengan mudah teradikalisasi. Untuk melawannya kita harus meningkatkan keamanan, keadilan, dan demokrasi. Kita perlu memastikan kepada masyarakat bahwa pendapat-pendapat utama yang dikemukakan oleh kelompok-kelompok ekstremis itu salah, seperti misalnya yang membenarkan adanya kekerasan, melakukan jihad dengan melakukan pemboman (bom bunuh diri). Strategi ini dilakukan dengan melibatkan organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok agama yang menolak ide-ide yang dikemukakan oleh jaringan terorisme.

Bersama strategi ini, Amerika Serikat memiliki strategi kontra terorisme. Memerangi terorisme harus menggunakan perencanaan yang matang, termasuk rencana dalam hubungannya dengan sekutu regional untuk mendukung unsur-unsur oposisi moderat. Tetapi itu saja tidak akan cukup, perencanaan juga harus dikembangkan menggunakan aset *offset* (misalnya, rudal) dan *drone* untuk menyerang semua faksi yang ditunjuk sebagai kelompok teroris yang beroperasi di Suriah termasuk ISIS tanpa memperdulikan tujuan mereka berjuang, baik yang menargetkan Amerika Serikat, atau target internasional lainnya. Secara lebih detail, Clint Watts telah menjelaskan bagaimana perang terhadap terorisme ini dijalankan. Berikut saran dan rekomendasi dari Watts:

- a. Mengembangkan rencana kontra terorisme secara eksplisit yang dirancang untuk melakukan beberapa tugas dengan baik.

- b. Menetapkan tujuan umum bagi masyarakat kontra terorisme untuk mencapai misinya dengan tanpa manajemen mikro atas setiap tindakan atau membatasi lembaga untuk membuat suatu *grand strategy* kontra terorisme.
- c. Melakukan tindakan untuk mengganggu dan mencegah ancaman terorisme saat ini dan masa depan.

ISIS memanfaatkan media sosial sebagai wadah eksistensi dan perjuangannya. Di samping itu, media juga digunakan untuk menyebar propaganda, merekrut anggota, serta memberitahukan pencapaian mereka dalam perang. Dalam propaganda, target ISIS salah satunya adalah anak muda muslim di negara-negara barat. (VIVAnews, Cara ISIS Merekrut Anggota dan Menyebarkan Propaganda 2014) Oleh karena itu, Amerika Serikat juga memanfaatkan media sosial untuk menepis pengakuan-pengakuan yang disuarakan ISIS. ISIS gencar menyuarakan bahwa seluruh umat Islam di dunia harus membela dan bersatu bersama ISIS, demikian pula dengan Amerika Serikat yang gencar menyuarakan bahwa ISIS adalah kelompok yang tidak perlu didukung keberadaannya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam laporannya bulan November 2014 menyebutkan bahwa jumlah warga asing yang bergabung dengan ISIS mencapai 15.000 orang. Turki menjadi gerbang utama mereka untuk bergabung dengan ISIS. Disebutkan bahwa sebanyak 4.000 warga Turki bergabung dengan ISIS. Oleh karena itu Amerika Serikat memulai memberi perlindungan dan memperketat penjagaan di daerah wilayah gerbang Turki.

ISIS mengontrol daerah yang luas dari Suriah dan Irak Utara dan telah menewaskan ribuan orang. Hal inilah yang membuat Amerika Serikat melakukan serangan-serangan udara ke Irak yang dimulai pada 8 Agustus 2014, dan lebih dari 200 serangan lanjutan. Presiden Amerika Serikat Barack Obama menguraikan tujuan militer Amerika Serikat melawan ISIS

sebagai langkah untuk mengecilkan gerak kelompok militan ISIS serta mencegah bertambahnya pengikut ISIS. (Rinaldo, Obama: Badan Intelijen AS Telah Meremehkan Kemampuan ISIS 2014)

Kedua yakni *protection*. *Protection* merupakan sebuah upaya melindungi warga Negara serta infrastruktur di suatu Negara dan meminimalisir kerentanan mereka terhadap serangan. Hal ini dapat dicapai melalui penguatan keamanan batas Negara, sistem transportasi umum, dan infrastruktur lainnya. Amerika Serikat perlu meningkatkan perlindungan dan pengawasan di perbatasan Negeranya dengan maksud agar para teroris menjadi lebih sulit untuk masuk, beroperasi di dalam suatu Negara. Peningkatan atau perbaikan dibidang teknologi untuk mengetahui data-data penduduk yang keluar masuk suatu Negara juga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan perbatasan. Berbicara tentang kemanan batas negara kita juga tidak boleh lupa memperhatikan standar keamanan transportasi baik domestik maupun lintas Negara baik transportasi darat, laut, maupun udara. Kita harus meningkatkan keamanan disetiap tempat aktivitas transportasi.

Amerika Serikat mempunyai beberapa prinsip yang menunjukkan *continuity and change* dari tujuan politik luar negerinya, yaitu:

- a. Menjamin kemerdekaan dengan perbatasan yang aman.
- b. Memperluas perbatasan tersebut untuk kepentingan keamanan navigasi dan perdagangan, wilayah untuk penduduk yang berkembang dan tersebarnya demokrasi.
- c. Untuk meningkatkan dan melindungi hak-hak dan kepentingan rakyatnya dalam bidang perdagangan dan penanaman modal di luar negeri, melindungi perdagangan di lautan bebas baik dalam keadaan damai maupun keadaan perang.

d. Untuk memelihara netralitas dan perdamaian dengan menjauhkan diri dari perang-perang sepanjang tidak mengganggu kepentingan Amerika Serikat. (Harwanto 1993)

Amerika Serikat membantu pasukan kurdi dengan memberikan sejumlah persenjataan untuk melawan ISIS. Amerika Serikat hanya melakukan operasi untuk melindungi warga negaranya dan sejumlah asetnya. Saat ini, Amerika Serikat telah berupaya memberikan sejumlah bantuan kemanusiaan terhadap para warga sipil yang mengungsi akibat ancaman ISIS. (Mahaputra 2014)

Upaya Amerika Serikat dalam mencegah orang-orang masuk ke dalam jaringan ISIS salah satunya juga yakni dengan membangun pangkalan militer di Afrika Utara. Amerika Serikat sedang melakukan negosiasi dengan negara-negara Afrika Utara untuk mendirikan pangkalan [militer](#) guna penyebaran drone di wilayahnya. Itu semua dilakukan untuk membendung perluasan organisasi ISIS ke luar perbatasan Irak dan [Suriah](#).

Belajar dari kasus sebelumnya yang terjadi di Amerika Serikat pasca terjadinya 9/11 yang dilakukan oleh terorisme Al-Qaeda, badan-badan intelijen Amerika Serikat selama ini telah meremehkan kelompok militan ISIS yang beraksi di wilayah Suriah dan lain sisi melebih-lebihkan kemampuan militer Irak untuk melawan kelompok militan tersebut. Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan intelijen Amerika Serikat meremehkan apa yang telah terjadi di Suriah setelah militan ISIS bergerak di bawah tanah ketika marinir Amerika Serikat mengalahkan al-Qaeda di Irak. Sehingga dengan strategi ini Amerika Serikat lebih serius dalam menanggapi tindak tanduk ISIS. Menjaga keamanan di perbatasan tidak hanya mencegah jaringan teroris masuk ke dalam suatu Negara, tetapi juga mencegah jaringan teroris dalam negeri melarikan diri ke Negara lain.

Ketiga yakni *response*. Prinsip ketiga ini menuntut suatu Negara ataupun suatu kawasan untuk bekerja sama lebih erat dengan organisasi internasional dan Negara lain. Usaha ini dimunculkan karena menyadari sifat terorisme yang tersebar secara global, sehingga diperlukan kerja sama untuk bisa saling berbagi informasi mengenai aktivitas terorisme, serta strategi-strategi terbaik untuk menanggulangi ancaman ini.

Korban dari ISIS tidak hanya di satu Negara, tetapi di beberapa Negara baik korban jiwa maupun perekrutan anggota. Atas dasar itulah kerjasama internasional sangat diperlukan dalam menghadapi terorisme. Berkaitan dengan strategi yang terakhir ini, Amerika Serikat telah melakukan beberapa kerjasama dengan Negara-negara lain di seluruh dunia. Italia, Arab Saudi, dan Amerika Serikat mengadakan pertemuan perdana Kelompok Pertempuran Jaringan Keuangan ISIS (CIFG) di Roma, Italia pada tanggal 19-20 Maret 2015. Perwakilan dari 26 negara dan beberapa organisasi multilateral bertemu menyepakati rencana aksi untuk menambah pemahaman mereka tentang kegiatan keuangan dan ekonomi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), berbagi informasi yang relevan, dan mengembangkan dan mengkoordinasikan upaya-upaya untuk memerangi kegiatan keuangan ISIS.

Sebagai organisasi yang didirikan untuk memerangi ISIS, CIFG akan bertemu secara teratur untuk berkonsultasi pada upaya untuk melawan kegiatan keuangan dan keberlangsungan ekonomi ISIS. Rencana aksi CIFG adalah mengidentifikasi kegiatan keuangan, mengganggu sumber pendapatan pokok, gerakan dan penggunaan dana dan ekonomi secara keseluruhan yang membuat ISIS tetap 'lestari' sampai saat ini.

Dalam pertemuan itu dirinci tentang tujuan utama dari CIFG antara lain:

- a. Mencegah keterlibatan ISIS dalam sistem keuangan internasional, termasuk jasa pengiriman uang yang tidak diatur.
- b. Menekan dan mengeksploitasi aset ekonomi dan sumber daya ISIS, seperti uang tunai, minyak, barang-barang pertanian, kekayaan budaya, dan komoditas ekonomi lainnya yang masuk ataupun berasal dari daerah dimana ISIS beroperasi.
- c. Menyangkal dana ISIS dari luar negeri, termasuk dari donor eksternal, pejuang teroris asing, dan tebusan atas penculikan.
- d. Mencegah ISIS dari memberikan dukungan finansial atau materi untuk afiliasi asing dalam upaya memperluas ambisi globalnya.

Untuk mencapai tujuan-tujuan itu, CIFG akan bekerja melalui pengumpulan dan saling berbagi informasi, mengembangkan penanggulangan baru, memberikan bantuan teknis, mengkoordinasikan upaya sanksi, memperkuat anti pencucian uang intern dan beberapa langkah-langkah taktis lainnya. (TEMPO.CO, 26 Negara Bersatu Perangi Sumber Keuangan ISIS 2015)

Amerika Serikat juga menjalin kerjasama dengan Negara Tiongkok untuk melwan ISIS. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan ISIS mendapatkan dana puluhan juta dolar perbulan dari penjualan minyak, uang tebusan, pemerasan dan tindak pidana lain dan pemerintah Obama mengancam akan mengenakan sanksi kepada pihak yang membeli minyak dari kelompok militan itu. (Reuters 2014) Tentu saja Tiongkok memiliki kepentingan dalam kerja sama kontra-terorisme tersebut, begitu juga Amerika Serikat. Namun dalam kasus ISIS ini negara Amerika Serikat dan Negara Tiongkok saling terbuka dan saling membantu untuk melawan terorisme.

Dalam pertemuan yang dilakukan Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat Ash Carter dan Menhan Ryamizard Ryacudu pada tanggal 26 Oktober 2015, Amerika Serikat menyatakan Indonesia dan Amerika Serikat perlu bekerja sama untuk menghadapi ISIS. (Masrifah 2015) Banyak upaya yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk membendung penyebaran ISIS. Tak hanya lewat publik, kata Robert Blake Jr (duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia), upaya ini juga bisa dilakukan lewat internet. Terkait internet, dalam pertemuannya pekan lalu, Carter dan Ryamizard juga membahas mengenai keamanan *cyber*. Mereka membuka pintu untuk interaksi lebih untuk hal tersebut.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry bertemu para pemimpin Asia Tenggara untuk meminta dukungan lebih besar pada aksi koalisi pimpinan negaranya dalam memerangi ISIS di Timur Tengah. John Kerry yang berada di Jakarta untuk menghadiri pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo berencana mengadakan pertemuan bilateral dengan presiden Indonesia itu dan perdana menteri dari Malaysia, Singapura, Sultan Brunei dan perdana menteri Australia serta menteri luar negeri Filipina. Agenda utama pembicaraan itu adalah upaya mengatasi rekrutmen warga Asia Tenggara oleh ISIS, mencegah para pejuang yang menjadi militan itu kembali ke wilayah, dan memblok aspek finansial para militan. Amerika Serikat menekankan pada negara-negara di dunia untuk bekerjasama dalam melawan ancaman global seperti ISIS.

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat ditarik hipotesis bahwa kebijakan Amerika Serikat terhadap ISIS yakni :

- a. Upaya prevention, mencegah agar masyarakat tidak terpengaruh ISIS.

- b. Upaya protection, melindungi Amerika Serikat dari terorisme ISIS dengan penguatan keamanan infrastruktur.
- c. Upaya response, upaya bekerjasama dengan Negara lain dengan meminta dan menyerukan kepada seluruh Negara di dunia untuk memerangi ISIS karena ISIS merupakan organisasi teroris.

E. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan batasan jangkauan dalam penelitian. Ini sebagai pengingat bagi penulis dalam melakukan penelitian agar tetap disiplin dalam melakukan penelitian dan juga mempermudah penulis dalam penelitian. Penulis membatasi jangkauan penelitian antara tahun 2013-2014. Dibatasi pada saat akhir 2013 karena ISIS mulai menjadi perhatian Negara di dunia dan Amerika Serikat mulai gencar membahas ISIS dan 2014 karena pendeklarasian terjadi setelah ISIS berhasil menduduki kota Mosul pada tanggal 30 Juni 2014.

Oleh karena melihat hal-hal tersebut di atas yang membuat penulis ingin mencari tahu dan tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi bagaimana kebijakan Amerika Serikat terhadap ISIS. Dengan hal tersebut, maka penulis mengambil judul **“Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Terorisme ISIS”**

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sosial dengan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data-data yaitu pengumpulan data yang dipilih adalah studi pustaka yang bersumber dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan baik itu berupa buku, jurnal ilmiah, laporan riset, surat kabar dan majalah. Suatu teknik pengumpulan data dimana penelitian tersebut

berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisa dengan menggunakan konsep yang diterapkan.

G. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai kebijakan Amerika Serikat terhadap ISIS bertujuan untuk:

1. Mengetahui sejarah Amerika Serikat sebagai negara adidaya.
2. Mengetahui sejarah terbentuknya ISIS.
3. Mengetahui kebijakan Amerika Serikat terhadap ISIS .

H. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan hasil penelitian skripsi yang penulis susun, maka penulis menyusun pembahasan :

Pada Bab satu, penulis akan membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

Pada Bab dua,penulis akan menjelaskan tentang Amerika Serikat sebagai negara adidaya dan haluan luar negeri Amerika Serikat.

Pada Bab tiga, penulis akan menceritakan tentang fenomena ISIS.

Pada Bab empat, yaitu berisi tentang kebijakan Amerika Serikat terhadap ISIS.

Pada Bab lima, yaitu berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.